

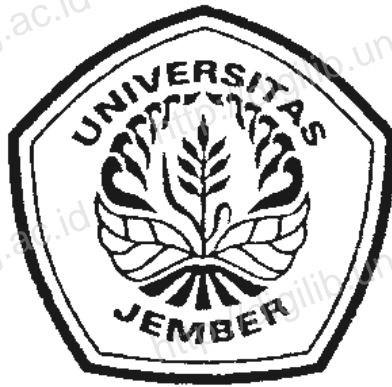
**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
NOMOR : 27 TAHUN 2004
TENTANG LARANGAN PELACURAN
DI KABUPATEN SITUBONDO**

*(THE IMPLEMENTATION of REGIONAL REGULATION
NOMOR : 27 TAHUN 2004
about THE PROHIBITION of PROSTITUTION in SITUBONDO RESIDENCE)*

TESIS
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI

Oleh :
DINI NOOR AINI
N I M : 070920101007

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMNISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS JEMBER
JEMBER, PEBRUARI 2010**



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
NOMOR : 27 TAHUN 2004
TENTANG LARANGAN PELACURAN
DI KABUPATEN SITUBONDO**

***(THE IMPLEMENTATION of REGIONAL REGULATION
NOMOR : 27 TAHUN 2004
about THE PROHIBITION of PROSTITUTION
in SITUBONDO RESIDENCE)***

TESIS TELAH DISERAHKAN KEPADA PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS JEMBER UNTUK MEMENUHI
SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR

MAGISTER ILMU ADMINISTRASI

Oleh :

DINI NOOR AINI

N I M : 070920101007

Pembimbing Tesis

Prof. Dr. HARY YUSWADI, MA, Pembimbing Utama
Drs. ABDUL KHOLIQ AZHARI, M.Si, Pembimbing Anggota

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS JEMBER
JEMBER, PEBRUARI 2010**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
NOMOR : 27 TAHUN 2004
TENTANG LARANGAN PELACURAN
DI KABUPATEN SITUBONDO**

**(THE IMPLEMENTATION of REGIONAL REGULATION
NOMOR : 27 TAHUN 2004
about THE PROHIBITION of PROSTITUTION
in SITUBONDO RESIDENCE)**

Kami menyatakan bahwa kami telah membaca tesis yang **dipersiapkan oleh DINI NOOR AINI ini, dan bahwa, dalam** pendapat kami, cukup memuaskan dalam cakupan dan kualitas sebagai suatu tesis untuk memperoleh gelar Magister Sains dalam bidang Ilmu Administrasi

Telah dipertahankan di depan Tim Pembimbing/Penguji pada tanggal 2 Pebruari 2010

Susunan Tim Pembimbing/Penguji
Ketua,

Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA
NIP 19520727 198103 1 003

Anggota I,

Anggota II,

Drs. Abdul Kholiq Azhari, M.Si
NIP 19560726 198902 1 001

Prof. Dr. Kabul Santoso, M.S
NIP 19430714 197008 1 001

Mengetahui/Menyetujui,
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi

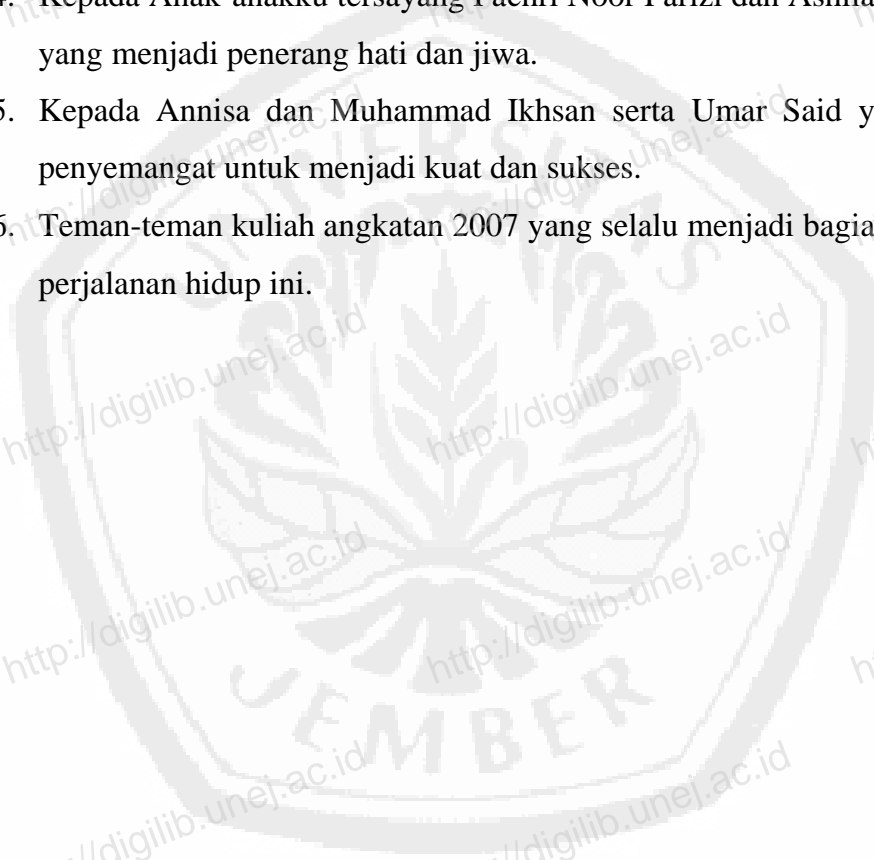
(Prof. Dr. Kabul Santoso, M.S)
NIP 19430714 197008 1 001

Direktur Program Pascasarjana

(Prof. Dr. A. Khusyairi, MA)
NIP 19401215 196501 1 001

PERSEMBAHAN

1. Kepada Almarhum Bapak Suyitno Ayahanda Tercinta, yang selalu memberi bimbingan dan doa sampai di akhir hayatnya.
2. Kepada Ibunda Sutinah Tercinta, yang selalu memberikan bimbingan, curahan kasih sayang serta doa yang tulus.
3. Kepada Nenek, Kakak Nunung dan Fitri serta Adik Hendra, yang selalu menyayangi dan memberi semangat
4. Kepada Anak-anakku tersayang Fachri Noor Farizi dan Ashila Noor Azzah yang menjadi penerang hati dan jiwa.
5. Kepada Annisa dan Muhammad Ikhsan serta Umar Said yang menjadi penyemangat untuk menjadi kuat dan sukses.
6. Teman-teman kuliah angkatan 2007 yang selalu menjadi bagian dari proses perjalanan hidup ini.



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami haturkan kepada Allah SWT yang memberi petunjuk dan kesehatan serta berkah yang tiada ternilai dibandingkan apapun, sehingga kami dapat menyelesaikan Tesis dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 27 tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Situbondo.

Dalam kesempatan ini kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada :

1. Rektor Univ. Abdurachman Saleh Situbondo yang memberikan ijin kepada kami untuk melanjutkan studi lanjut di Universitas Jember.
2. Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Universitas Jember.
3. Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA sebagai pembimbing utama.
4. Drs. Abdul Kholiq Azhari, M.Si sebagai pembimbing anggota.
5. Rekan-rekan angkatan 2007 yang senantiasa selalu membantu dan menjadi penyemangat kami untuk segera menyelesaikan tesis ini.
6. Keluarga dan seseorang yang selalu memotivasi kami untuk “kuat dan sukses”.

Akhirnya tak ada gading yang tak retak, semoga tesis ini memberi manfaat dan kemajuan bagi Pemerintah Kabupaten Situbondo khususnya, serta masyarakat Situbondo pada umumnya.

ABSTRAK

Oleh : DINI NOOR AINI

Pembimbing Utama : Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA

Pembimbing Anggota : Drs. Abdul Kholiq Azhari, M.Si

Kabupaten Situbondo memiliki motto sebagai Kota SANTRI, yang berarti Sehat, Aman, Nyaman, Tertib, Rapi dan Indah. Filosofi dari motto ini adalah keinginan dari Pemerintah Daerah dan masyarakat Situbondo, agar Kabupaten Situbondo bersih dan tertib, baik dari segi Fisik maupun non fisik (Bersih dari perampokan, perjudian, pelacuran dan kejahatan lainnya). Pada tahun 2004 di Situbondo dikeluarkan sebuah Perda tentang Larangan Praktek Pelacuran, yang tertuang dalam Perda No. 27 Tahun 2004. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir praktek pelacuran, dimana dari waktu ke waktu praktek pelacuran di Kota Situbondo telah sampai pada titik yang cukup meresahkan. Praktek pelacuran yang beroperasi tidak hanya di eks lokalisasi saja, tetapi telah merambah ke pinggir jalan Kota Situbondo. Dalam implementasi Perda No. 27 Tahun 2004 ditemui beberapa kendala, diantaranya adalah pemberian sanksi, sosialisasi dan disposisi implementor kebijakan. Untuk itu sangat menarik untuk dikaji dan diteliti tentang bagaimana implementasi Perda No. 27 Tahun 2004 tersebut. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa apakah Perda No. 27 Tahun 2004 telah dilaksanakan oleh aparat pemerintah dan ditaati oleh masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan *policy research* (penelitian kebijakan) yang merupakan penelitian terapan (*applied research*). Sedangkan tehnik pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk verifikasi dan validitas data dilakukan dengan metode triangulasi. Sedangkan untuk model implementasinya digunakan model Edward III. Dari penelitian yang telah dilakukan, implementasi Perda No 27 Tahun 2004 telah dilaksanakan namun kurang optimal, dikarenakan terdapat kekurangan dalam implementasi Perda tersebut, yaitu lebih pada faktor manusia. Untuk itu ada beberapa saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti kepada Pemerintah Kabupaten Situbondo, *Pertama*, Perlu adanya perubahan pendekatan, pendekatan yang semula bersifat instruktif kepada sasaran kebijakan, hendaknya diubah menjadi pendekatan yang sifatnya negosiatif-persuasif. *Kedua*, Perlu adanya tambahan Sumber daya manusia dan sumber dana. *Ketiga*, perlu adanya koordinasi dan konsolidasi antara lembaga sejenis. *Keempat*, Perlu adanya birokrasi yang profesional dan diterima oleh masyarakat.

Kata Kunci : Masalah Sosial, Kebijakan, Implementasi

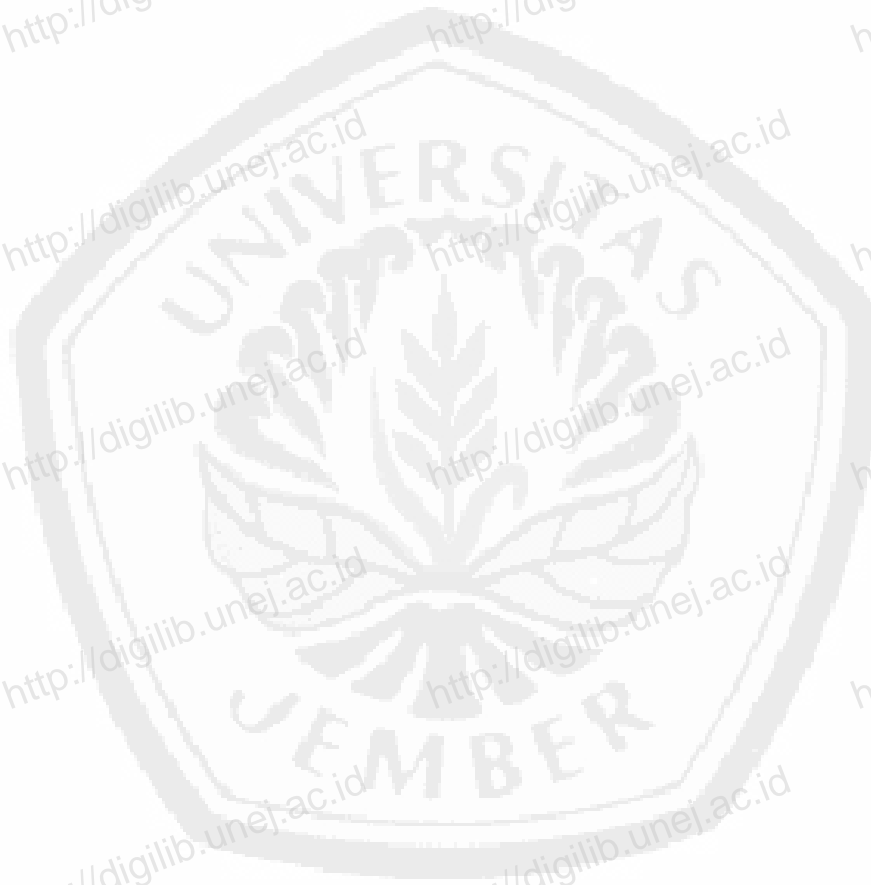
DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Abstrak.....	vi
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar.....	x
Daftar Bagan.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.4.1 Manfaat Praktis.....	18
1.4.2 Manfaat Teoritis.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Kebijakan dalam Perspektif Ilmu Administrasi Publik.....	5
2.2 Konsep Kebijakan Publik.....	9
2.3 Konsep Implementasi Kebijakan Publik.....	13
2.4 Kontrol Pelaksanaan.....	17
2.4.1 Pelaku Kontrol Pelaksana Kebijakan Publik.....	18
2.4.2 Standart Prosedur Operasi Kontrol.....	18
2.4.3 Sumber Daya Keuangan dan Peralatan.....	18
2.4.4 Jadwal Pelaksanaan Kontrol.....	19
2.5 Model Implementasi Kebijakan Publik.....	19
2.5.1 Faktor Komunikasi.....	19
2.5.2 Sumber Daya.....	24
2.5.3 Disposisi.....	29
2.5.4 Struktur Birokrasi.....	30
2.6 Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2004.....	36
2.7 Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2004.....	36
2.8 Kerangka Berpikir Model Edwards III dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2004.....	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
3.1 Pendekatan Penelitian.....	44
3.2 Tipe Penelitian.....	44
3.3 Fokus Penelitian.....	45
3.3.1 Individu.....	45
3.3.2 Kelompok Masyarakat.....	45
3.3.3 Lembaga.....	46

3.4	Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian.....	46
3.5	Sumber Data	46
3.5.1	Kata-kata dan Tindakan.....	46
3.5.2	Sumber Tertulis	47
3.5.3	Foto.....	47
3.5.4	Data Statistik	47
3.6	Analisa Data	47
3.6.1	Reduksi Data	47
3.6.2	Penyajian Data.....	48
3.6.3	Penarikan Kesimpulan.....	48
3.7	Keabsahan Data.....	48
3.7.1	Derajat Kepercayaan	48
3.7.2	Keteralihan	50
3.7.3	Kebergantungan.....	50
3.7.4	Kepastian	50
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
4.1	Gambaran Umum Kabupaten Situbondo	52
4.2	Deskripsi Lembaga Implementor Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2004.....	54
4.2.1	Pedoman Prosedur Tetap Operasional dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja.....	59
4.3	Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2004	63
4.4	Sumber Daya pendukung Implementasi	72
4.4.1	Sumber Daya Manusia	72
4.4.2	Sumber Daya Anggaran	74
4.4.3	Sumber Daya Peralatan (Fasilitas)	76
4.4.4	Sumber Daya Informasi dan Kewenangan.....	77
4.5	Disposisi Implementor	79
4.6	Struktur Birokrasi Implementor	86
4.7	Kontrol Pelaksanaan Peraturan Daerah No 27 Tahun 2004 ..	94
4.7.1	Kontrol dari Lembaga Formal dan Informal.....	94
4.7.2	Standar Prosedur Operasi Implementasi Perda No 27 . Tahun 2004	95
4.7.3	Jadwal Pelaksanaan Perda No 27 Tahun 2004.....	95
4.8	Implementasi Peraturan Daerah No 27 Tahun 2004, Sebuah Catatan Akhir	96
BAB V	PENUTUP.....	108
5.1	Kesimpulan	108
5.2	Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA	111
PANDUAN WAWANCARA	113
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 : Luas Wilayah Kabupaten Situbondo per Kecamatan	53
Tabel 4.2 : Sarana Operasional Polisi Pomong Praja Situbondo.....	76
Tabel 4.3 : Pengetahuan, Pemahaman dan Pendalaman tentang Isi	
Perda No. 27 Tahun 2004	84



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Peta Kabupaten Situbondo 53



DAFTAR BAGAN

Bagan 1 : Model Implementasi Kebijakan Edwards.....	17
Bagan 2 : Implementasi Kebijakan Perda Nomor 27 Tahun 2004.....	35
Bagan 3 : Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Situbondo	61

